**BAB IV**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**Paparan Data**

1. **Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung**

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di kota Tulungagung, dengan alamat Jl. Ir. Soekarno Hatta No.17 Tulungagung Tlp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121. Pengadilan Agama Tulungagung menempati gedung permanen yang terletak di Ds. Balarejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung. Terdiri dari 2 (dua) lantai seluas 1698 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 9.196 M2.

Adapun Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tuluangagung adalah sebagai berikut :

1. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

1110 43’ – 1120  07’ : Bujur Timur

70  51’ - 80  18’ : Lintang selatan

1. Luas dan batas-batas wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

1. Jumlah penduduk

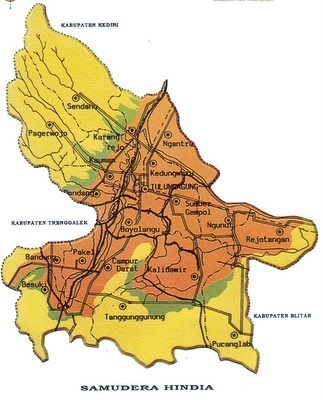
Berdasarkan data statistik tahun 2007 dari pusat statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagunng sebanyak 1.002.807 jiwa dan sebanyak 982.352 (98,13 %) jiwa beragama Islam.[[1]](#footnote-2)

1. Yuridiksi

Secara administratif, luas wilayah kabupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai 1.150,41 km2, terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam peta kabupaten Tulungagung sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar : I**

**Peta Kabupaten Tulungagung**

****

Melihat kondidsi obyek kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu luas wilayahnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan scara berkeselanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja, serata mutu produktifitasnya.
3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikable dan akseptable terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana dan prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau intrukusi-intruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekina lembga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Tulungagung harus turut serta melakulan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Pengadailan Agama Tulungagung yang bersetatus kelas IA (teratas) tentunya juga mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan pelayanan publikasi.

1. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung**

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman yaitu *“Mewujudkan Supremasi Hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mempu menjawab panggilan pelayanan publik”*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan misi-misi yang mengacu Pada Misi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengdilan modern yang didukung teknologi yang memadai.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
5. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dar campur tangan pihak lain.
6. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyaraka.
7. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
8. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor. KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 februari 1992 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung**

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, sedaqah, dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perrubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[[3]](#footnote-4)

Secara umum, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memeberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lain.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) Tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penetuan awal bulan hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Unadang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
7. Memberikan pengesahan akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya.[[4]](#footnote-5)
9. **Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung**

Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan sesuai dengan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketaua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Prosedur penerimana perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung dilakukan sistem meja-meja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kelompok meja I, terdiri dari 6 personil yang dipimpin oleh panitera Muda Permohonan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
2. Menerima surat gugatan, permohonan, perlawana (verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
3. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat/pemohon.
4. Menyiapkan konsep pembagian tugas tiap ketua majelis dan panitera pengganti.
5. Membuat laporan pembagian berkas perkara tiap majelis pada tiap akhir tahun.
6. Mengevaluasi perkara baru setiap akhir tahun.
7. Kelompok meja II, terdiri darei 5 personil yang dipimpin oleh Panitera Muda Permohonan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
   * 1. Bertanggung jawab kelompok tugas meja II.
     2. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon.
     3. Mendaftar/ mencatat surat gugatan atau npermohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.
     4. Menyerahkan kembali satu rangkapsurat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat/ pemohon.
     5. Memasukkan asli surat gugatan/ permohonan ke dalam map dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/ permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilengkapi blangko PMH, PHS, dan penunjukan PP.
     6. Mencatat alam register sesuai dengan jalannya perkara.
     7. Mencatat dalam register perkara tingkat Banding, Kasasi, PK, Sita, Eksekusi dan lain-lain sesuai dengan jalannya perkara.
     8. Meneliti berkas perkara barau yang masuk.
8. Kelompok meja III, terdiri dari 6 personil yang dipimpin oleh Panitera Muda Hukum melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
9. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan.
10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan/ penetapan apabila ada permintaan dari para pihak.
11. Menerima dan memberikan tanda terima atas ; memori banding, Kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan jawaban/ tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.
12. Mengatur urutan dan giliran jurusita/ jurusita pengganti dalam melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.
13. Membuat daftar hadir perkara permohonan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan membuat daftar perkara cerai talak untuk diterbitkan akta cerainya.
14. Bertanggung jawab terhadapp akta cerai yang sudah diterbitkan dan belum diserahkan kepada pihak berperkara.
15. Mengevaluasi terhdap pelaksanaan penyelesaian perkkara tiap majelis.

Untuk menciptakan serta demi kelancaran sproses penerimaan perkara, pembuatan berica acara persidangan, pembuatan putusan/ penetapan hingga pengetikan akta putusan pada Pengadilan Agama Tulungagung, telah dipersiapkan dengan perangkat komputer dengan menggunakan program SIADPA (Sistem Administrasi Peradilan Agama), sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1. **Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (3):[[5]](#footnote-6)

”Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator”.

Pasal 11 ayat (6):[[6]](#footnote-7)

“Jika pada pengadilanyang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator”.

Terkait dengan siapa yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Tulungagung,

Bapak Roji’un, menjelaskan “bahwa pada prinsipnya mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator yang pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga yang sudah terakriditsi oleh Mahkamah Agung dan memperoleh sertifikat. Akan tetapi, melihat kondisi yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung saat ini, hanya terdapat satu hakim yang memiliki sertifikat mediator yaitu Bapak M. Edi Afan, dengan SK dari Ketua Pengadilan berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) maka semua hakim pada Pengadilan dapat menjadi mediator”. [[7]](#footnote-8)

**Temuan Penelitian**

**Fungsi Mediator Sebagai Katalisator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim mediatorPengadilan Agama Tulungagung, terkait dengan fungsi mediator sebagai katalisator dalam penyelesaiaan sengketa perceraian.

Bapak M. Edi Afan, mengatakan “mediator sebagai katalisator yaitu mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, bahwa dalam memfasilitasi para pihak mediator mengadakan pertemuan dalam ruangan kusus dengan tujuan untuk menjebatani dan bermusyawarah serta menanyakan pokok sengketa yang dipermasalahkan para pihak. Dengan seperti ini mediator dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang selanjutnya akan ditanyakan kepada para pihak kembali guna mencari kejelasan tentang pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Setelah hal itu diketahui oleh para pihak, maka selanjutnya mediator memberikan masukan-masukan dan motivasi kepada para pihak agar permasalahan yang mereka sengketakan dapat diselesaikan dalam forum kebersamaan dan tidak membawa dampak negative yang berlarut-larut apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi”.[[8]](#footnote-9)

Bapak Tontowi, mengatakan “Mediasi mengandung makna yakni, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang mediator. Dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak diharapkan dapat meminimalisir terbuangnya waktu serta biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka dalam menyelesaikan sengketa”.[[9]](#footnote-10)

Bapak roji’un, mengatakan “dalam memediasi para pihak, mediator pertama-tama menanyakan permasalahan-permasalahan yang menjadi konflik dalam rumah tangga kepada para pihak, sehingg apabila mediator mengetahui masalah-masalah dari kedua belah pihak akan mempercepat proses mediasi”.[[10]](#footnote-11)

Terkait fungsi mediator sebagai katalisator, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Tulungaung, yang mana fungsi tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ruangan mediasi dan para hakim yang bertugas sebagai mediator.[[11]](#footnote-12)

**Fungsi Mediator Sebagai Pendidik dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Setelah mendapatkan beberapa jawaban terkait dengan fungsi mediator sebagai katalisator, selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fungsi mediator sebagai pendidik.

Bapak Tontowi, mengatakan “mediator dalam memediasi para pihak selalu berusaha memberikan saran dan anjuran-anjuran supaya para pihak mempertimbangkan lagi kerugian dan keuntungan dari perceraian, selanjutnya keputusan diserahkan kepada para pihak, apakah mereka mau berdamai atau tetap melanjutkan”.[[12]](#footnote-13)

Terkait dengan pemberdayaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung yang menjalankan fungsi mediator sebagai pendidik, peneliti melihat secara langsung proses terjadinya mediasi yang di mediatori oleh Bapak roji’un pada waktu Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bahwasannya seorang mediator bertindak sebagai seorang pendidik yang memberikan berbagai macam pengetahuan dan menjelaskan dampak-dampak dari terjadinya sebuah perceraian.[[13]](#footnote-14) Hal ini dipertegas oleh Bapak Thoif pada waktu peneliti wawancarai di ruang hakim.

Bapak Toif, menjelaskan “dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai pendidik, proses mediasi bisa dijadikan media dakwah, karena selain mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat juga menasehati dan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pihak, tidak sedikit para pihak yang tidak mengetahui ilmu tentang berumah tangga secara islami sehingga itu menjadi puncak permasalahan yang dihadapi para pihak”.[[14]](#footnote-15)

Bapak M. Edi Afan, menjelaskan “dalam memediasi para pihak, mediator memberikan saran-saran terkait dampak dari perceraiannya, baik dari segi hukum, sosial dan agama. Dari segi hukum mediator menjelaskan bahwa apabila dalam pernikahannya itu sudah dikarunia anak dan apabila terjadi perceraian maka anak itu tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua, dampak sosial dari perceraian yaitu menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan menjadi perubahan setatus, dan dampak dari segi agama diantaranya bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan lain-lain. Dari situlah mediator akan memasukan nilai-nilai pendidikan bagi para pihak”.[[15]](#footnote-16)

Ibu Eko (pengacara), mengatakan “keberadaan mediator dalam suatu sengketa amat sangat penting, karena dengan adanya mediator para pihak tidak akan mudah terprofokasi yang akirnya menambah dan memuncakkan emosinya, jadi fungsi mediator disini yaitu memberikan arahan-arahan serta pengetahuan-pengetahuan dengan tujuan supaya para pihak mau memikirkan kembali efek dari perceraiannya terhadap kehidupan selanjutnya.”[[16]](#footnote-17)

**Fungsi Mediator Sebagai Penerjemah dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui fungsi mediator sebagai penerjemah, maka hakim mediator Pengadilan Agama Tulungagung memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bapak M. Edi Afan, Menjelaskan “bahwa pada waktu mediasi, tidak semua pihak yang berperkara menginginkan mediasi, apalagi jika para pihak tidak memahami tentang materi hukum. Biasanya para pihak menanyakan terkait tentang kenapa harus diadakan mediasi, padahal para pihak tidak mengiginkan perkaranya sampai berlarut-larut.Pertanyaan seperti ini biasanya sering muncul ketika mediator memediasi perkara perceraian.Jadi tugas mediator disini yaitu menjelaskan kenapa harus menempuh mediasi terlebih dahulu kepada para pihak.Setelah hal itu dipahami oleh para pihak, selanjutnya mediator menjelaskan tentang pokok persengketaan yang belum dapat dimengerti oleh pihak lawan”.[[17]](#footnote-18)

Bapak Tontowi, menjelaskan “hal terpenting bagi mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengeri. Misalkan dalam perkara perceraian, biasanya perceraian seringkali diinginkan oleh pihak istri, maka tugas mediator disitu menyampaikan teruma kepada pihak istri mengenai tentang konsekuensi dari perceraian yang akan terjadi. Seperti halnya pembagian harta gono-gini dan lain-lain, sehingga dari situ akan menjadi pertimbangan untuk masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi”.[[18]](#footnote-19)

**Fungsi Mediator Sebagai Nara Sumber dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Tulungagung, terkait dengan fungsi mediator sebagai nara sumber dalam penyelesaiaan sengketa perceraian.

Bapak Tontowi, menjelaskan “mediator bukanlah orang yang serba mengetahui, akan tetapi dalam menjalankan tugas sebagai mediator setidaknya mediator harus menguasai prosedur dan memahami tentang materi sengketa yang dihadapi para pihak. Dalam memahami materi sengketa tersebut, mediator tidak hanya terpaku dengan isi surat gugatan, akan tetapi pada waktu proses mediasi mediator berusaha menggali materi tersebut melalui Tanya jawab dengan para pihak. Dengan seperti itu mediator dapat menemukan titik sengketa yang terjadi, dari situ akan memudahkan mediator untuk menasehati dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa.[[19]](#footnote-20)

Bapak Mubahi, mengatakan “dalam memediasi para pihak, mediator berusaha menjelaskan maksud dari isi gugatan kepada tergugat, setelah itu mediator menanyai pihak tergugat apakah isi dari gugatan tersebut memang membicarakan dari permasalahan yang mereka sengkatakan, setelah melalui beberapa pertanyaan, selanjutnya mediator menyimpulkan pokok dari persengketaan yang dihadapi para pihak”.[[20]](#footnote-21)

Memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berperkara sudah merupakan tugas dan tanggung jawab oleh semua hakim yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Usaha memperdamaikan para pihak tidak hanya dilakukan oleh hakim mediator pada proses mediasi saja, akan tetapi setiap hakim yang memeriksa perkara telah diwajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada paras pihak sampai memberikan beberapa penawaran solusi yang pada intinya menyuruh pihak untuk rukun kembali.[[21]](#footnote-22)

Lebih lanjut Bapak M. Edi Afan, menjelaskna “ketika para pihak datang pada pertemuan yang disepakati, mediator memulai pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah bersedia hadir dan menjadikan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Dalam sambutan mediator, ia menjelaskan bahwa mediator hanya berperan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan ia tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil keputusan. Keputusan tetap berada ditangan masing-masing pihak yang bersengketa. Pada kesempatan yang sama mediator juga harus meyakinkan kembali para pihak yang masih ragu tentang proses mediasi, karena hal ini penting untuk memperkuat landasan dan posisi mereka menuju tahap selanjutnya dari mediasi. Mediator bersama para pihak menyususn aturan yang harus diikuti/dipegang bersama dalam menjalankan proses mediasi selanjutnya”.[[22]](#footnote-23)

**Fungsi Mediator Sebagai Penyandang Berita Jelek dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam kaitannya fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, peneliti menanyakan kepada mediator Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu:

Bapak, M. Edi Afan, menjelaskan “kehadiran mediator dalam memediasi para pihak tidaklah selalu mendapat respon positif. Karena dengan hadirnya mediator, para pihak menilai bahwa mediator hanya menghambat proses perceraiannya.Akan tetapi menurut bapak Edi, terkait fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek pada Pengadilan Agama Tulungagungmerupakan kewajaran yang biasa, dan mediator harus memahami hal itu.[[23]](#footnote-24)

Bapak Tontowi, menjelaskan “Pengadilan Agama merupakan pengadilan kusus, ysng mana keberadaan mediator pada Pengadilan Agama Tulungagung merupakan meditor yang menangani permasalahan perdata saja (hukum privat), terkait mediator dikatakan sebagai penyandang berita jelek, beliau mengatakan bahwa pada waktu mediasi memang sering terjadi diantara para pihak saling beradu argumen dalam mempertahankan kepentingannya masing-masing. Hal ini terjadi karena pada waktu mediasi para pihak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencurahkan kegelisahan isi hati dan emosinya, sehingga terkadang para pihak kehilangan kendali dan sampai membentak-bentak”.[[24]](#footnote-25)

**Fungsi Mediator Sebagai Agen Realitas dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Keberadaan mediator di Pengadilan Agama Tulunagung, merupakan perwujudan dari Perma No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Terkait dengan fungsi mediator sebagai agen realitas, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

Bapak Tontowi berpendapat “Pentingnya mediasi itu ditandai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga peradilan itu tidak banyak menimbun perkara, tapi mediasi itu dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri sengketa yang tengah berlangsung”.[[25]](#footnote-26)

Lebih lanjut Bapak M. Edi Afan, menjelaskan “Melihat fenomena yang terlihat oleh masyarakat bahwa upaya penyelesaian perkara sangat sulit, rumit dan berbelit-belit. Sehingga muncul fikiran dari upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses Ligitasi, contohnya penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk mengkhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karenabagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik keuntungan dari segi waktu dan keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah”.[[26]](#footnote-27)

Bapak Mubahi menjelaskan “Mediator itu perannya seperti fasilitator atau mediator hanya memfasilitasi kedua belah pihak saja. Jika para pihak tidak mempunyai keinginan yangkuat maka kecil kemungkinan untuk berhasil. Kalau dari awal para pihak kelihatan tidak mau menempuh forum mediasi, mediator bisa saja mengatakan mediasi itu akan gagal, contohnya disuruh mediasi tapi penggugat didak mau datang, dan dipangil yang kedua kali tetap tidak datang, otomatis mediasi kan tidak dapat dilaksanakan. Karena mediasi harus dilaksanakan jika para pihak hadir.Jadi mediasi hanya sebatas sebagai fasilitator, jadi tidak menentukan segala-galanya”.[[27]](#footnote-28)

Melihat fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, yang mana seorang mediator memiliki fungsi sebagai agen realitas dalam menjalankan Perma No.o1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, sampai saat ini peneliti sebatas mengetahui bahwa mediator melakukan komunikasi dengan para pihak yang berperkara pada waktu proses mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama dengan waktu yang terbatas.[[28]](#footnote-29)

**Fungsi Mediator Sebagai Kambing Hitam dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam setiap konsep yang diajukan oleh para pihak tidak semua bisa diaksepsi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidak puasan yang kesemuanya itu bisa dilampiaskan kepada mediator.

Dalam kaitannya fungsi mediator sebagai kambing hitam, Bapak M. Edi Afan, menjelaskan “pada dasarnya kehadiran mediator dalam sebuah sengketa yang dihadapi para pihak tidaklah selalu memberi kesenangan diantara para pihak, apalagi dalam masalah perceraian. Misalnya si istri tetap ngotot untuk minta diceraikan, akan tetapi si suami tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehadiran mediator disitu dinilai menghambat proses terjadinya perceraian. Apabila kejadian seperti ini terjadi pada proses mediasi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perdebatan sengit diantara para pihak untuk mempertahankan kepentinagnnya masing-masing. Maka dari itu tugas mediator disini yaitu brusaha meredam kemarahan para pihak dengan beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan mediator ”.[[29]](#footnote-30) Hal ini juga dikatakan oleh Watiyah (pihak yang bersengketa), dia mengatakan “bahwa proses mediasi itu memperpanjang proses perceraiannya padahal sudah jelas dalam isi surat gugutan saya, bahwa saya menggugat cerai terhadap suami saya. Tapi kenapa bapak hakim mediator masih saja ingin mendamaikan saya, apakah hal semacam itu perlu dilakukan kalau hanya memperpanjang proses saja”.[[30]](#footnote-31)

**pembahasan**

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Katalisator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi dan pelaksanaan mediasi dibantu oleh mediator. Dalam Perma No. 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat, tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menemukan solusi apa yang diinginkan oleh para pihak. Mediator yang dimasksud adalah mediator yang bertugas pada Pengadilan yang dapat berasal dari hakim Pengadilan atau mediator luar Pengadilan.

Perma No. 1 tahun 2008 sejalan dengan asas-asas Peradilan Agama yaitu;

“1). Asas personalitas keislaman, 2).Asas kebebasan, 3).Asas wajib mendamaikan, 4).Asas persidangan terbuka untuk umum, 5).Asas legalitas, 6).Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, 7).Asas equality (persamaan), 8) Asas membantu para pencari keadilan”.[[31]](#footnote-32)

Asas kewajiban mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai anjuran yang ada dalam islam. Dan setiap kali persidang ketua majelis masih berkewajiban mendamaikan para pihak.sehingga sudah seharusnya hakim mediator mengemban tugas dalam mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara dengan baik dan tidak menjadi formalitas.

Hakim mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator haruslah memahami para pihak, memiliki kopentensi yang didalamnya ada beberapa ketrampilan yaitu; bahasa yang baik dan mudah dipahami para pihak, menggunakan pendekatan agama, psikologis dan sosial.

Tidak penting bagi mediator mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara yang efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Tidak heran jika para pihak pada awalnya menunjukkan sikap yang *apatis*terhadap proses perundingan karena belum terbangun antusias untuk itu. Seorang katalisator harus mampu mengubah kondisi itu dalam waktu tidak terlalu panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi bahan dan topik membicarakan awal ketika membuka pertemuan pertama.[[32]](#footnote-33)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, ada yang mengatakan bahwa fungsi mediator sebagai katalisator yaitu mediator memfasilitasi para pihak untuk menempuh kesepakatan berdamai dengan mengadakan pertemuan antara para pihak yang berperkara guna mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa.Artinya di Pengadilan Agama Tulungagung mediator yang menjalankan fungsi sebagai katalisator saat ini baru sebatas mengadakan pertemuan pada ruangan mediasi, perilaku seperti ini menurut pengamatan peneliti belum mencapai usaha yang maksimal dalam mendamaikan para pihak. Kalau ditinjau dari segi hukum acara yang berlaku perilaku seperti ini memang sudah benar, akan tetapi kalau ditinjau dari segi dedikasi dan panggilan seruan moral masih bisa dikatakn minim usaha hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menyelesaikan sengketa dengan membangun ruang dialog antar pihak yang bertikai, fasilitator selayaknya mengetahui peran dan strategi terntentu yang meski diterapkan selama proses fasilitasi berlangsung. Pengetahuan dan teknik ini diperlukan dalam upaya menciptakan suatu kondisi fasilitasi yang kondusif dimana para pihak saling menghargai, memahami, terbuka dan bersedia menerima kritikan.

Fasilitator hendaknya menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan di mana sengketa itu terjadi.Lingkungan para pihak yang harus diketahui secara baik oleh fasilitator meliputi agama, adat, budaya, karakter, kebiasaan, dan keinginan tertentu dari pihak yang *berkonfrontasi*. Beberapa sikap (peran) dan langkah konkret (strategi) yang mesti dikuasai oleh fasilitator adalah:

*Pertama*, tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator. Di sini fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha menjembatani dan membangun dialog antara para pihak. penegasan sikap netral ini mempunyai arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menepis dugaan bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap kepentingan terhadap penyelesaian atau konflik tersebut. Sasaran fasilitator adalah menciptakan suasana yang kondusif demi terciptanya dialog yang terbuka.

*Kedua,* fasilitator hendaknya mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah pihak.identifikasi dan aturan dialog diperlukan agar proses dialog dapat berjalan seacara struktur dan tidak melenceng jauh dari alur dan tujuan utamanya.

*Ketiga,* katalisator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan merka.Fasilitator juga harus memiliki strategi dan antisipasi jika emosi dan kepentingan para pihak mengemuka saat dialog.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa mediator hanya menjadi fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Pendidik dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Mendamaikan para pihak yang bersengketa memang tidaklah mudah dilakukan, Pengadilan Agama Tulungagung yang mempunyai tugas dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang perdata bagi orang islam tentunya mengalami berbagai hambatan yang akirnya membawa dampak terhadap penyelesaian perkara yang berlarut-larut. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Tentang prosedur mediasi ini telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 yang mana dalam pasal 2 ayat (3) “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkab putusan batal demi hukum”.

Dalam pelaksanaan mediasi terdapat prosedur dan tahapan medisai yang mesti dilewati oleh hakim mediator dan para pihak, ini juga diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 bab II pasal (7) ayat 1 sampai 6. Ketika masuk dalam tahapan mediasi, hakim mediator perlu menyiapkan dirinya dengan sudah membaca berkas perkara yang menjadi tanggungannya, dengan begitu bisa mempersiapkan dan menentukan solusi-solusi yang nantinya diberikan kepada para pihak dalam mediasi.Dengan adanya persiapan dan konsep seperti ini dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung lansung bisa dilihat sesudah dimediasi.

Para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung baik yang bersertifikat maupun belum dalam melaksanakan mediasi mempunyai beberapa konsep keberhasilan mediasi yang berbeda-beda satu sama lain dan ini tentunya sesuai dengan kapasistas keilmuan yang mereka miliki. Sebelum menawarkan solusi dari permasalahan terlebih dahulu hakim mediator memberikan sejumlah pengertian, nasehat, dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi para pihak.

Seperti yang dikatakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa dalam memediasi para pihak proses mediasi dapat dijadikan media dakwah, karena selain mendamaikan para pihak yang bersengketa mediator juga menasehati dan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pihak. Kalau dalam masalah perceraian misalnya mediator memberi pengetahuan tentang berumah tangga secara islami.

Dari penjelasan beberapa hakim mediator terkait dengan fungsi mediator sebagai pendidik. Bahwa mediator sebagai seorang pendidik harus memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa berawal dari keikhlasan untuk saling menerima kepentingan-kepentingan pihak lain, sulit untuk melanjutkan proses perdamaian jika para pihak bertahan pada pendirian sepihak, sehingga kedua belah pihak harus saling memahami dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Penerjemah dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam menjalankan fungsi mediator sebagai penerjemah, sebagaimana yang terurai di atas, hakim mediator haruslah memahami para pihak dalam menerjemahkan usulan dan keinginan-keinginan para pihak, memiliki kompetensi yang di dalamnya ada beberapa ketrampilan yaitu; bahasa yang baik dan mudah dipahami para pihak. Selain itu masih ada beberapa ketrampilan yang harus diperhatikan oleh hakim mediator dalam menjalankan tugasnya;

1. Menjadi pendengar aktif, pendengar aktif yang dimaksudkan adalah pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya lewat sikapnya dalam berkomunikasi dengan para pihak, tidak disebutkan dengan hal-hal yang mengganggu konsentrasinya, dan tidak bersifat mengadili.
2. Hakim mediator harus pandai dalam memecahkan masalah dan menawarkan solusi karena inti dari mediasi menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak.
3. Jika dalam mediasi para pihak terlihat tegang dalam mengungkapkan masalah dan juga terbawa emosi, maka hakim mediator harus memposisikan diri sebagai penengah.Hakim mediator juga harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditujukan kepada masing-masing pihak. pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi secara positif dan tenang oleh hakim mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan ditemukan penyebab utama terjadi sengketa diantara para pihak.
4. Kalau para pihak sudah mencapai kesepakatan setelah dimediasi maka tugas hakim mediator merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Maka para pihak membutuhkan tandatangannya, sehingga dengan penandatanganan tersebut maka secara formal mediasi telah selesai.

Bahasa yang digunakan oleh hakim mediator juga harus bahasa baik dan sederhana sehingga dapat membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan hakim mediator dalam mengungkapkan masalahnya. Ketrampilan ini semua akan diperoleh jika sudah mengikuti pelatihan mediasi. Sehingga dengan adanya pelatihan dan mengaplikasikan dalam mediasi di Pengadilan akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak.

Jadi dengan adanya kompetensi seorang hakim mediator sangatlah membantu para pihak dalam menyelesaikan perkaranya dengan jalan mediasi, disamping pihak yang masih mempunyai keinginan untuk berdamai. Kalau kompetensi seorang hakim mediator tersebut terpenuhi bukan tidak mungkin kebrhasilan yang akan tercapai. Tetapi jika jika para pihak sudah tidak ingin berdamai dan sudah sepakat untuk berpisah maka sekuat apapun usaha mediator dalam mediasi juga tidak akan berhasil.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Nara Sumber dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Karena mediator yang menjalankan mediasi merupakan hakim mediator yang tidak telibat dalam pemeriksaan perkara yang dimediasi, maka seorang hakim mediator harus menggali informasi-informasi dari para pihak lewat pertemuan dalam proses mediasi.

Dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki *independensi* terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa .mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak, yang mana hal itu sulit dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkaranya karena akan berbenturan dengan aturan kode etik yang melarang hakim pemeriksa perkara untuk berkomunikasi dengan salah satu pihak yang berperkara. Disinilah salah satu letak kelebihan proses perdamaian dengan bantuan seorang mediator dibandingkan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Seperti yang dikatakan oleh beberapa hakim mediator yang telah terurai di atas, pendapat tersebut mengandung arti bahwa dalam proses mediasi seorang mediator harus mampu menggali berbagai informasi dari para pihak yang berperkara yang mana seorang meditor setidaknya dapat memberikan solusi dan penjelasan sekucukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Penyandang Berita Jelek dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Menjadi pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menrima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk mengertak pihak lawan melalui perantaraan mediator. Dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disamapaikan oleh para pihak.

Seperti yang dikatakan oleh hakim mediator yang terurai di atas, bahwa kedatangan mediator di tengah-tengah orang yang bersengketa tidaklah selalu mendapatkan respon yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak menilai mediator hanyalah orang yang akan menghambat proses penyelesain sengketanya.

Mediator dalam memediasi para pihak akan mendapatkan berbagai jenis informasi yang harus di inventarisir dan dinetralisasi dengan pola komunikasi yang baik, latar belakang sengketa yang bertendensi sentiment pribadi merupakan persoalan yang paling dominan dalam membentuk perang propaganda. Mediator tidak boleh terpancing untuk hanyut dalam pertengkaran para pihak namun justru harus mampu membalikkan situasi menjadi kondusif dan terarah. Ejekan dan penekanan-penekanan dengan menggunakan alibi sepihak akan memunculkan beberapa tahapan proses, karena masing-masing pihak akan berusaha mengendalikan situasi, namun mediator jangan sampai kehilangan kendali dengan tetap melakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap dominasi alibi secara tidak berimbang.

Kemampun mediator dalam medredukasi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksanakannya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usulan-usulan penyelesaian harus dioptimalkan dalam setiap tahapan proses.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Agen Realitas dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.Usaha untuk merealisasikan perdamain di Pengadilan Agama Tulungagung melalui jalur mediasi memang benar-benar dilakukan oleh hakim yang bertugas sebagai mediator. Dalam beberapa kasus di pengadilan permasalahan yang dibawa ke pengadilan masih dalam taraf wajar sehingga ketika dimediasi masih ada kemungkinan untuk damai, sehingga hakim mediator mempunyai semangat untuk terus mendorong para pihak menempuh perdamaian. Hal ini dikarenakan keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudkannya.Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Seperti yang dikatakan oleh beberapa hakim meditor di atas, bahwa dalam mewujudkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (sengketa perceraian) mengalami kesulitan, rumit, berbelit-belit. Sehingga kejadian seperti ini tentunya akan menyulitkan mediator.

Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang lebih lemah bersediamenyerahkan beberapa hak mereka, dan ada pula usulan-usulan yang diajukan oleh salah satu pihak sulit dipahami oleh pihak lawannya. Perbedaan dan usulan-usulan yang tidak masuk akal diantara para pihak merupakan kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipahami oleh mediator bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar-menawar dari para pihak. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan dan usulan-usulan yang tidak masuk akal tersebut dapat dijelaskan oleh mediator untuk mencarai titik terang dalam penyelesaia sengketa dalam forum kebersamaan.

1. **Analisis Fungsi Mediator Sebagai Kambing Hitam dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Sebuah mediasi pun akan menjadi lancar berkat dukungan dan keseriusan mediator, hakim dalam menjalankan tugas sebagai mediator harus dipahami sebagai tugas penting, menjadi mediator bukan sekedar formalitas dalam memeriksa suatu perkara akan tetapi dijadikan tugas yang membutuhkan kemampuan professional.

Di Pengadilan Agama Tulungagung sejauh ini baru ada dua hakim mediator yang pernah mengikuti pelatihan mediasi, yaitu Bapak M. Edi Afan dan Bapak Mubahi. Sehingga keduanya memegang peran aktif sebagai hakim mediator yang seharusnya bisa meng-uptimalkan keberhasilan mediasi. Akan tetapi karena perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung dalam setiap tahunnya mencapai ribuan perkara khususnya perkara perceraian sebagaimana terlampir, hal ini mengakibatkan penumpukan tugas bagi hakim yang ada khususnya hakim mediator. Sebagaimana yang peneliti ketahui, di Pengadilan Agama Tulungagung hakim mediator yang menjalankan mediasi adalah hakim yang memeriksa perkara dan belum ada hakim yang kusus untuk menjadi hakim mediator, sehingga hakim yang tidak mempunyai kompetensi sebagai mediator harus menjalankan proses mediasi. Praktek seperti ini dibenarkan oleh Undang-undang, akan tetapi menurut pengamatan peneliti, sangat rentan dengan permaslahan yang akan timbul dari para pihak yang akan mengikuti proses mediasi, karena para pihak harus menunggu terlalu lama kedatangan mediator, sehingga hal ini bisa saja memancing emosi para pihak. Dari sini Profesionalisme seorang hakim mediator sangat diperlukan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh M. Edi Afan, bahwa menjadi seorang mediator itu haruslah benar-benar memahami tentang prosedur mediasi, karena tanpa adanya kepahaman mediator akan mengalami kesulitan dalam mengusahakan perdamaian diantara para pihak. hal ini akan terbukti ketika masing-masing pihak mempunyai konsep yang bertentangan dengan konsep lawan rundingnya. Dan apabila hal ini terjadi mediatorlah yang akan menjadi sasaran untuk disalahkan oleh masing-masing pihak. jadi profesionalitas mediator sangat dibutuhkan dalam memberikan beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan sebelum mediasi dilaksanakan.

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa keprofesionalan seorang mediator sangat berpengaruh dalam meredam emosi dan memberikan motivasi kepada para pihak untuk berunding secara baik dan saling menguntungkan.Jadi fungsi mediator disini yaitu menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat debat kusir dan memberi penjelasan kepada masing-masing pihak apabila dalam proses perundingan tersebut terjadi sesuatu yang mengancam ketidak berhasilannya proses mediasi.

1. Team IT PA Tulungagung, Pengadilan Agama Tulungagung, dalam [*http://*[*www.pa-tulungagung.go.id*](http://www.pa-tulungagung.go.id)*//*](http://www.pa-tulungagung.com//)*,* diakses 04 Mei 2011 [↑](#footnote-ref-2)
2. Team IT PA Tulungagung, Pengadilan Agama Tulungagung, dalam [*http://*[*www.pa-tulungagung.go.id*](http://www.pa-tulungagung.go.id)*//*](http://www.pa-tulungagung.com//)*,* diakses 04 Mei 2011 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (t.t.p. : Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mei Santi, *Pembatalan Perkawinan Karena Pertalian Nasab Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor : 0554/Pdt.G/2009/PA.TA,* (Tulungagung: Skripsi Tidak Ditrbitkan), hlm,66-67 [↑](#footnote-ref-5)
5. Perma No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,..*pasal 11 ayat (6) [↑](#footnote-ref-7)
7. Roji’un, *wawancara*, (Tulungagung 4 juli 2011) [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Edi Afan, *wawancara*, (Tulungagung 30 Juni 2011) [↑](#footnote-ref-9)
9. Tontowi, *wawancara*, (Tulungagung 1 Juli 2011) [↑](#footnote-ref-10)
10. Roji’un, *wawancara*, (Tulungagung 16 februari 2011) [↑](#footnote-ref-11)
11. *Observasi*, (Tulungagung, 16 Februari 2011) [↑](#footnote-ref-12)
12. Tontowi.*Wawancara,..* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Observasi*. (Tulungagung, 16 februai 2011) [↑](#footnote-ref-14)
14. Toif, *Wawancara*, (Tulungagung, 1 maret 2011) [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Edi Afan. *Wawancara*(Tulungagung 30 juni 2011) [↑](#footnote-ref-16)
16. Eko, *wawancara*, (Tulungagung, 30 juni 2011) [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Edi Afan. *Wawancara,*(Tulungagung 30 juni 2011) [↑](#footnote-ref-18)
18. Tontowi,..(Tulungagung, 2 Juli 2011) [↑](#footnote-ref-19)
19. Tontowi, *wawancara*, (Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-20)
20. Mubahi, *wawancara*, (Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-21)
21. *Observasi*, (Tulungagung, 24 Februai 2011) [↑](#footnote-ref-22)
22. M. Edi Afan, *wawancara*(Tulungagung 30 juni 2011) [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Edi Afan, *wawancara* (Tulungagung 30 juni 2011) [↑](#footnote-ref-24)
24. Tontowi, *wawancara,*(Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-25)
25. Tontowi, *wawancara,*(Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-26)
26. M. Edi Afan, *wawancara*,(Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-27)
27. Mubahi, *wawancara,*(Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-28)
28. *Observasi,* (Tulungagung, 30 Juni 2011) [↑](#footnote-ref-29)
29. M. Edi Afan, *wawancara,*(Tulungagung, 1 juli 2011) [↑](#footnote-ref-30)
30. Watiyah, *wawancara*, (Tulungagung, 13 Juni 2011) [↑](#footnote-ref-31)
31. Mardani, *hukum Acara Perdara,*…hlm.37 [↑](#footnote-ref-32)
32. D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*,..hlm, 114. [↑](#footnote-ref-33)